

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial menjadi problematika yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jika berbicara masalah sosial, kesejahteraan sosial merupakan bagian dari fenomena kemiskinan secara umum (Suharto, 2004). Kemiskinan masih menjadi masalah yang mempengaruhi semua negara berkembang dan miskin, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan khas dengan beberapa dimensi yang telah bertahan dalam kehidupan masyarakat dalam kurun waktu yang sangat lama. Permasalahan kemiskinan di Indonesia harus ditanggapi dengan sangat serius, karena saat ini banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Intinya, kota-kota miskin jauh tertinggal dibandingkan komunitas lain yang memiliki potensi lebih tinggi karena kurangnya penyediaan perumahan yang sesuai, prospek usaha, dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial-ekonomi. Rendahnya standar hidup dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan aspek kehidupan lainnya merupakan ciri-ciri kemiskinan.

Tautan berikut ini akan mengarahkan penerima bansos ke laman yang dibuat Kementerian Sosial RI: cekbansos.kemensos.go.id. Berdasarkan alamat dan nama yang dimasukkan, halaman ini mencantumkan setiap penerima bantuan sosial Kementerian Sosial RI di desa atau kelurahan. Kemampuan masyarakat untuk secara mandiri memastikan apakah namanya memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial atau tidak adalah hasil yang diharapkan. Selain itu, dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat setempat untuk mengetahui identitas

penerima bantuan di sekitar mereka, sehingga mereka dapat ikut serta dalam tugas mengamati ketepatan sasaran bantuan di wilayah mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup subsisten, termasuk kebutuhan non-makanan. Ketidakmampuan membayar kebutuhan seperti pangan dan gizi dianggap sebagai tanda kemiskinan. Oleh karena itu, mereka yang hidup di kelas menengah dan memiliki pengeluaran bulanan di bawah garis kemiskinan dianggap miskin. (BPS: 2020). Jutaan orang di Indonesia terkena dampak kemiskinan dalam skala yang semakin besar. Orang-orang ini berjuang untuk mendapatkan layanan publik, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial. Mereka juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka akan pakaian, kesehatan, dan pendidikan, serta terbatasnya pendapatan dan prospek kerja. Pemerintah berupaya untuk meremehkan masalah-masalah ini sebagai masalah masyarakat, khususnya kemiskinan.

Berikut adalah Indeks bantuan Pkh tahun 2023:

Tabel 1 Indeks Bantuan Pkh

Kriteria penerima bantuan	Bantuan/tahun
1. Ibu Hamil (Bumil)	Rp. 3. 000. 000
2. Anak Balita	Rp. 3. 000. 000
3. Sekolah Dasar (SD)	Rp. 900. 000
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Rp. 1. 500. 000
5. Sekolah Menengah Atas (SMA)	Rp. 2. 000. 000

Sumber: <https://digitaldesa.id>

Tabel diatas merumuskan daftar kriteria penerima bantuan dan jumlah bantuan penerima PKH dan dengan adanya bantuan tersebut dapat memberikan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Tabel 2 Data Penerima Manfaat di Kecamatan Lowokwaru

KPM PKH KECAMATAN LOWOKWARU	
DINOYO	132
JATIMULYO	209
KETAWANGGEDE	57
LOWOKWARU	208
MERJOSARI	96
MOJOLANGU	123
SUMBERSARI	68
TASIKMADU	120
TLOGOMAS	88
TULUSREJO	114
TUNGGULWULUNG	152
TUNJUNGSEKAR	138
TOTAL	1505

Sumber: Pendamping PKH Kelurahan Merjosari (2024).

Melalui tabel di atas diketahui bahwa dari 12 kelurahan di Kecamatan Lowokwaru, dan dapatan rata-rata Kelurahan Merjosari dipilah masuk pada dapatan golongan kurang mampu. Juga jumlah Penduduk Miskin 1691 orang , 438 KK (menurut standar BPS) di Kelurahan Merjosari dan 96 KPM di Kelurahan Merjosari. Untuk itu, pemerintah perlu membuat rencana untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), memiliki sejumlah inisiatif untuk mengentaskan kemiskinan, antara lain pengembangan usaha kecil, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan

berbasis kesejahteraan. Inisiatif Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif berbasis bantuan.

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dalam rangka pembangunan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Program ini menggunakan Transfer Tunai Bersyarat (CCT), sebuah inisiatif perlindungan sosial yang diciptakan oleh Bank Dunia untuk negara-negara miskin. Keputusan Menteri Kesejahteraan Sosial mengatur tata cara pelaksanaan PKH. Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 101/huk/2022 tentang Penyelenggaraan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan.

PKH bertujuan untuk memberikan peluang bagi keluarga berpenghasilan rendah agar mereka dapat memperoleh manfaat dari berbagai program kesehatan dan pendidikan serta memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu (Sofianto, 2020). Program bantuan sosial bernama Program Keluarga Harapan (PKH) tersedia bagi keluarga berpenghasilan rendah dan rentan yang telah terdaftar dalam data terpadu untuk tujuan pengobatan masyarakat miskin. Keluarga-keluarga tersebut telah teridentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dan pusat data dan informasi kesejahteraan sosial bertugas mengelola data tersebut. (Letari & Najidah, 2019).

Program PKH merupakan upaya untuk memberikan dukungan sosial bersyarat kepada masyarakat, dengan penekanan khusus pada keluarga miskin

atau disebut juga keluarga penerima PKH. (kemensos. go. id. pkh). Dengan bantuan program yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos) ini, pengguna bantuan seharusnya bisa hidup lebih baik berkat biaya yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih tinggi. Diharapkan dengan mengubah perilaku penerima bantuan dan memperkenalkan mereka pada lembaga keuangan formal, program ini akan menurunkan kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, sebanyak 22. 718 masyarakat Kota Malang telah mendapatkan jatah bansos tunai. Angka tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 13. 990 orang dan dilengkapi informasi 8 orang non-DTKS yang sebelumnya dilaporkan Pemerintah Kota Malang sebanyak 8. 728 orang. Berbagai penyaluran bantuan dilakukan kepada berbagai penerima manfaat. Bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap bank umum milik negara (BUMN). Setelah itu, bantuan akan diberikan kepada penerima melalui kantor pos. Total pengguna bantuan yang dilayani Kantor Pos Kota Malang adalah 20. 094 orang. (Malangtimes. com adalah sumbernya).

Sasaran PKH adalah keluarga berpenghasilan rendah dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Program ini memiliki komponen kesehatan, dan persyaratan kelayakannya mencakup anak-anak di bawah usia enam tahun dan ibu hamil atau menyusui. Komponen pendidikan yang memenuhi persyaratan bagi anak sekolah dasar atau MI, sekolah menengah atas atau MA, sekolah menengah atas atau MTs, dan anak berumur enam sampai dengan dua puluh satu tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajibnya selama dua belas tahun. Terdapat komponen kesejahteraan sosial

tambahan yang menjadi persyaratan sejak tahun 2016. Warga lanjut usia lebih diutamakan. Mengurangi pekerja di bawah umur di Indonesia dan meningkatkan angka kehadiran sekolah bagi generasi muda RTSM, khususnya SD/MI dan SMP/MTS, merupakan dua tujuan utama program ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, Program Keluarga Harapan Pendidikan (PKH) bertujuan untuk menggugah RTSM untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah dan menepati janjinya untuk mengikuti proses pembelajaran minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam jangka waktu tertentu. bulan pada tahun ajaran.

Sesuai petunjuk pelaksanaan, program ini telah dilaksanakan di Desa Merjosari. Namun demikian, berdasarkan hasil pra survei, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang berdampak pada pelaksanaan program PKH:

Permasalahan pertama kurangnya partisipasi masyarakat sebagai contohnya saja pada saat pertemuan kelompok ada KPM di kelurahan yang tidak hadir dengan berbagai alasan Tidak hanya itu saja, seringkali KPM juga mengabaikan terhadap kewajiban dari komponen yang mereka miliki.

Permasalahan kedua adanya perubahan peserta PKH sehingga pendamping harus merasa kesulitan mengetahui dan adanya pembaruan data dan proses verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi terkait KPM baru.

Permasalahan ketiga bahwa juga rendahnya kesadaran masyarakat akan tingkatan kemampuan yang dimiliki dimana masyarakat sering terjadi penerima manfaat PKH kurang termotivasi untuk bekerja atau meningkatkan kesejahteraan keluarganya secara mandiri. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan, yaitu karena

kebiasaan bergantung pada bantuan sosial dan kurangnya kesadaran akan pentingnya usaha mandiri, atau ketidakmampuan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja. Berdasarkan Uraian diatas peneliti tertarik mengambil Judul Skripsi **“PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG (Studi Implementasi Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/huk/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Mengembangkan pengetahuan penulis dan mempraktikkan ide-ide yang dia pelajari di perguruan tinggi sebagai alat pelatihan untuk pengembangan pengetahuan adalah nilai bermanfaat yang secara teoritis diharapkan dalam menghasilkan tesis ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Temuan peneliti memberikan wawasan terkait implementasi, khususnya yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Bagi masyarakat, sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi yang belum mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
- c. Penulis mengharapkan penelitian dapat memperluas pemahaman dan keahliannya dalam melakukan penyelidikan dan menghasilkan karya tulis ilmiah.